

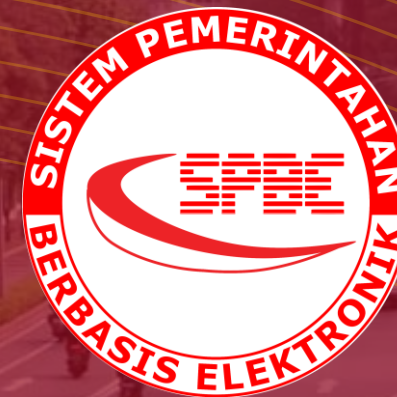


KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



Penguatan **ASPEK SPBE** Di Kab/Kota

Jakarta, 23 Februari 2021



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Tujuan SPBE



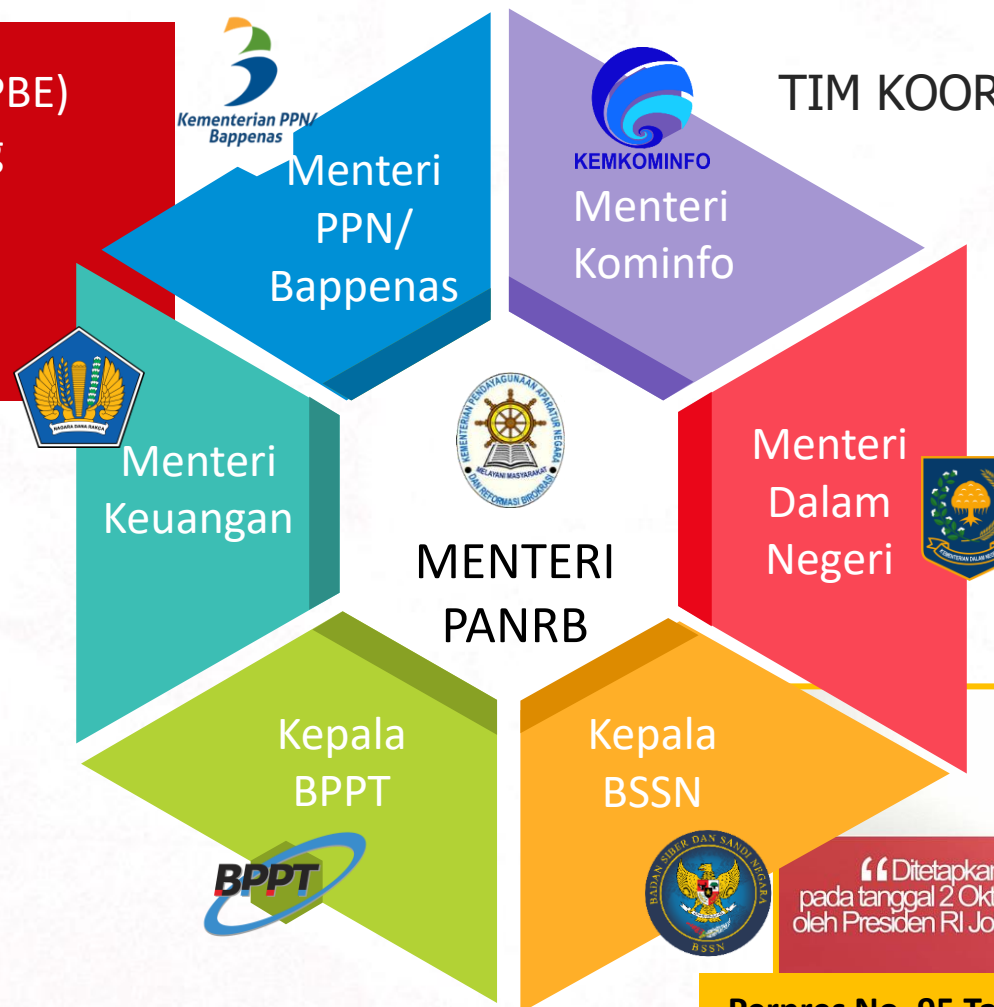
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel



Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya



Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE



TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(Pasal 59 ayat (3) Perpres 95/2018 tentang SPBE)

“Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018, oleh Presiden RI Joko Widodo

Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE



KERANGKA PERPRES 95/2018

TATA KELOLA SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu



MANAJEMEN SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan

PENYELENGGARA SPBE

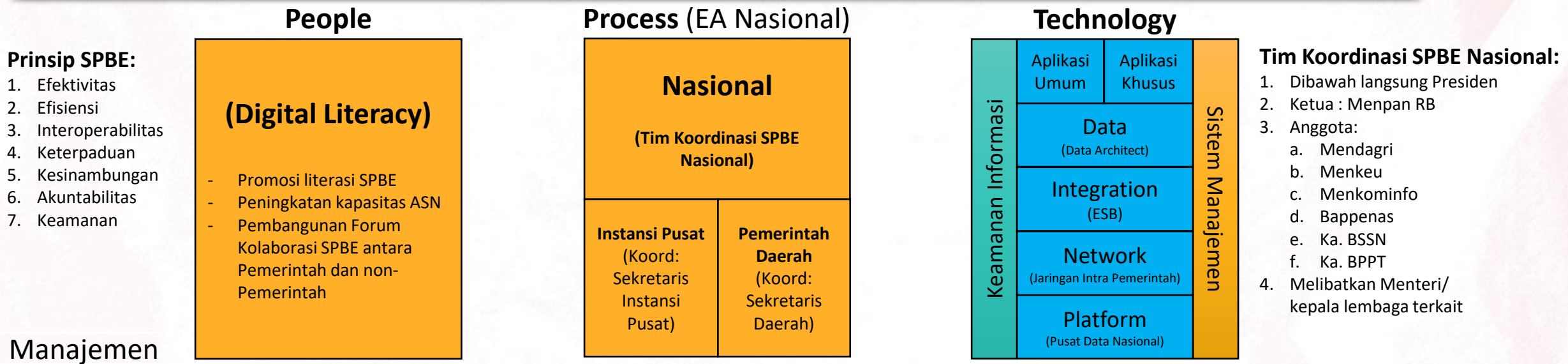
- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

LAYANAN SPBE

- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Layanan Publik Berbasis Elektronik

GOVERNMENT AS A PLATFORM

PERPRES SPBE



- Tim Koordinasi SPBE Nasional:**
1. Dibawah langsung Presiden
 2. Ketua : Menpan RB
 3. Anggota:
 - a. Mendagri
 - b. Menkeu
 - c. Menkominfo
 - d. Bappenas
 - e. Ka. BSSN
 - f. Ka. BPPT
 4. Melibatkan Menteri/ kepala lembaga terkait

Manajemen

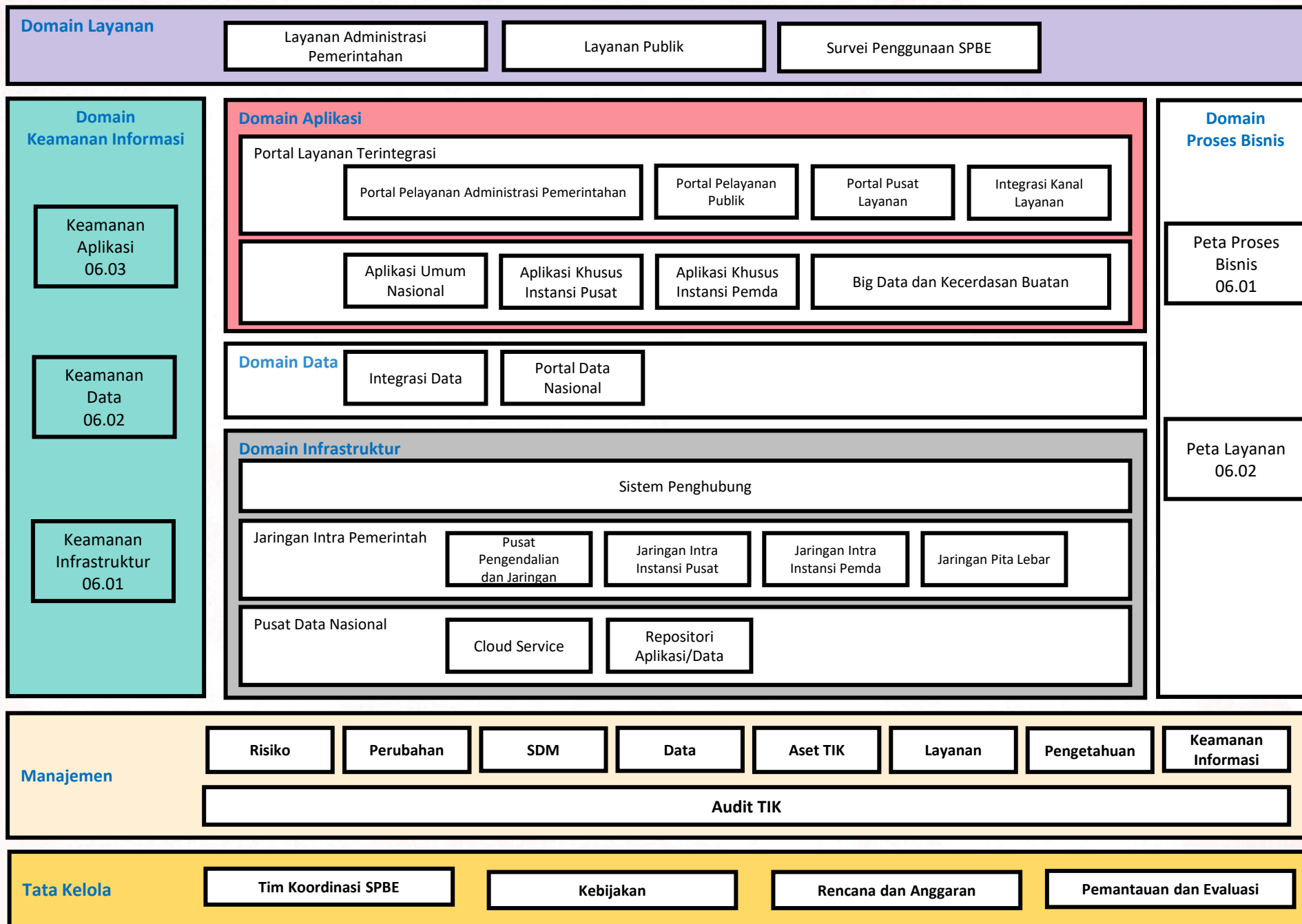


- Kemenpan RB:
- Bappenas
- Kemenkominfo
- BPPT
- BSSN

- Reviu arsitektur SPBE
- Penyelarasan dengan Pemda
- Menetapkan aplikasi umum

- Tahapan implementasi SPBE:
1. Penyelarasan arsitektur dan anggaran
 2. Konsolidasi infrastruktur, keamanan, dan anggaran
 3. Konsolidasi proses bisnis dan aplikasi melalui penerapan EA Nasional
 4. Konsolidasi data dan informasi
 5. Konsolidasi Layanan Digital Nasional

Pemetaan Kegiatan SPBE



PENGUATAN ASPEK SPBE DI DAERAH

Kebijakan

Tata Kelola

Manajemen

Layanan

**PermenPANRB No. 59
Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi
SPBE**

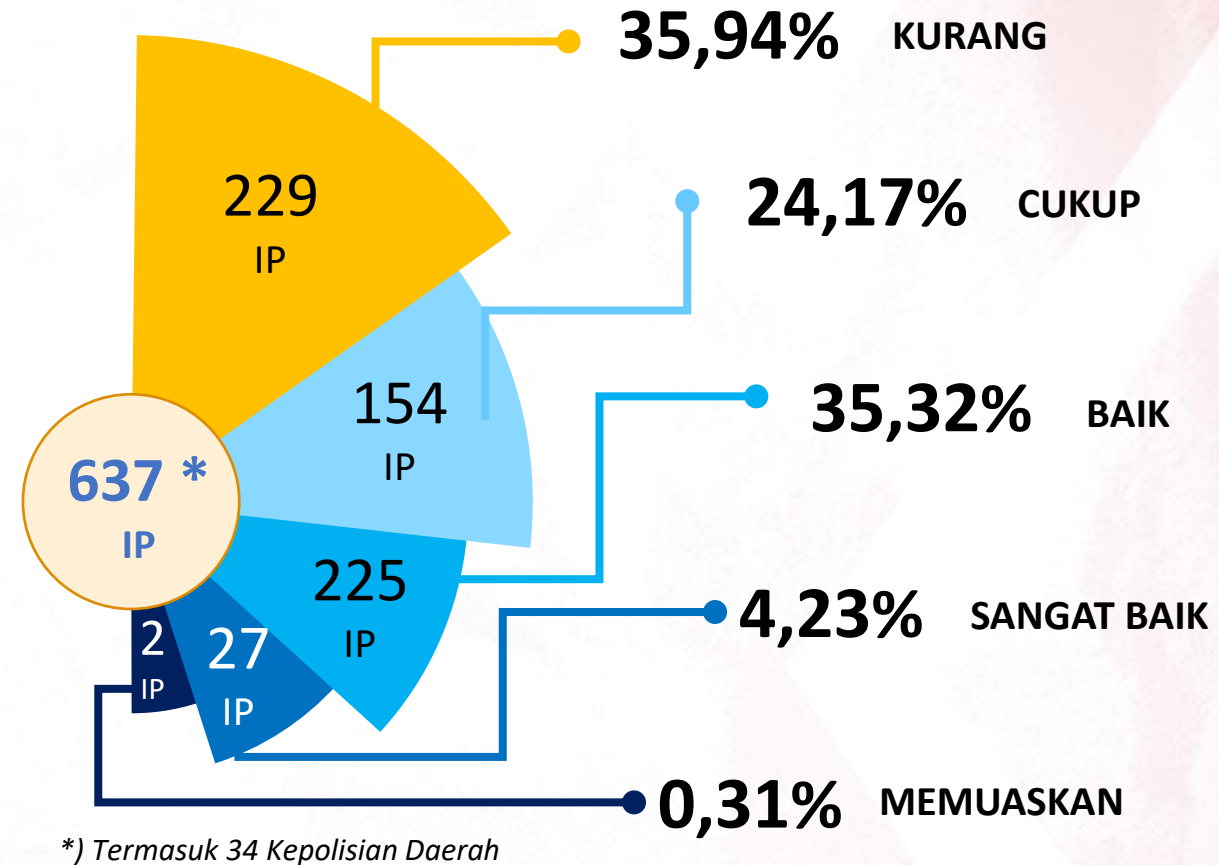


HASIL EVALUASI SPBE

INDEKS SPBE NASIONAL

Deskripsi	2019	2020	Peningkatan
Indeks SPBE Nasional	2,18	2,26	0,08
Indeks Domain Kebijakan	1,95	2,07	0,12
Indeks Domain Tata Kelola	1,87	1,95	0,08
Indeks Domain Layanan	2,40	2,48	0,08
Jumlah IP Berpredikat "Baik" atau lebih tinggi	196 IP (31,81%)	254 IP (31,81%)	58 IP (9,10%)

- Dari pelaksanaan evaluasi SPBE terhadap 637 K/L/D Indeks SPBE Nasional Tahun 2020 adalah 2,26 dengan predikat "Cukup".
- Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di K/L/D dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo) dan belum dilakukan kolaborasi/integrasi antar K/L/D.



No.	Aspek	Evaluasi SPBE Tahun Sebelumnya	Evaluasi SPBE Tahun 2021
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
2	Domain	3 Domain (Kebijakan, Tata Kelola, Layanan)	4 Domain (Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, Layanan)
3	Aspek & Indikator	7 Aspek, 35 Indikator	8 Aspek, 47 Indikator

EVALUASI SPBE 2021

PERMENPAN 59/2020

LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



PERPRES 95/2018



PERMENPANRB 5/2018

Pedoman **Evaluasi SPBE** digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE untuk **mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

REVISI TERHADAP PERMENPANRB 5/2018

PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 terbit lebih dulu (9 bulan 11 hari) sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit.

Beberapa **amanat** Perpres 95 Tahun 2018 yang **belum terakomodasi** dalam PermenPANRB No. 5 Tahun 2018, antara lain:

- Arsitektur SPBE (Pasal 6–12)
- Peta Rencana SPBE (Pasal 13–19)
- Jaringan Intra Pemerintah (Pasal 32)
- Sistem Penghubung Layanan (Pasal 33)
- Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34–39)
- Keamanan SPBE (Pasal 40–41)
- Manajemen SPBE: Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, Manajemen SDM SPBE, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan (Pasal 46–54)
- Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan (Pasal 55–58)



STRUKTUR PENILAIAN

PERMENPANRB 5/2018

DOMAIN (3)
ASPEK (7)
INDIKATOR (35)

PERMENPANRB 59/2020

DOMAIN (4)
ASPEK (8)
INDIKATOR (47)

Indeks

SPBE

Domain

Kebijakan Internal

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Aspek

Kebijakan Tata Kelola SPBE

Kebijakan Layanan SPBE

Kelembagaan/ Penyelenggara SPBE

Perencanaan dan Strategi

TIK

Penerapan Manajemen

Audit TIK

Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Publik

Indikator

7 | 10

10 | -

2 | 2

2 | 4

3 | 4

- | 8

- | 3

7 | 10

4 | 6

Semula

Menjadi

BEBERAPA INDIKATOR BARU

Kebijakan

- Arsitektur SPBE
- Peta rencana SPBE
- Manajemen Data
- Manajemen Keamanan Informasi
- Layanan Pusat Data
- Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Sistem Penghubung Layanan

Tata Kelola

- Arsitektur SPBE
- Peta rencana SPBE
- Layanan Pusat Data
- Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Sistem Penghubung Layanan
- Penyelenggara SPBE
- Forum Kolaborasi SPBE

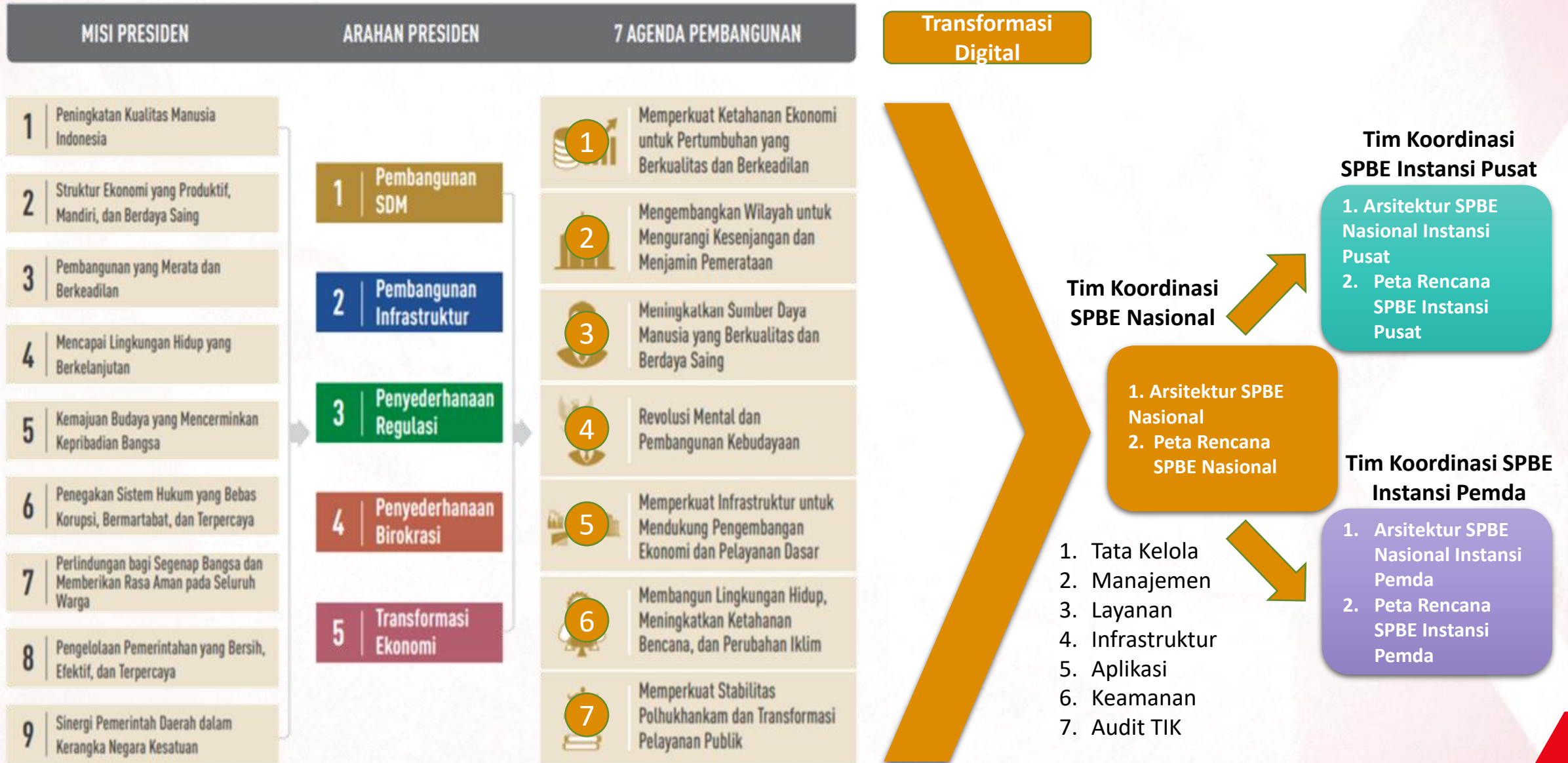
Manajemen

- Risiko
- Data
- Keamanan Informasi
- Perubahan
- Aset TIK
- SDM SPBE
- Layanan
- Pengetahuan
- Audit TIK

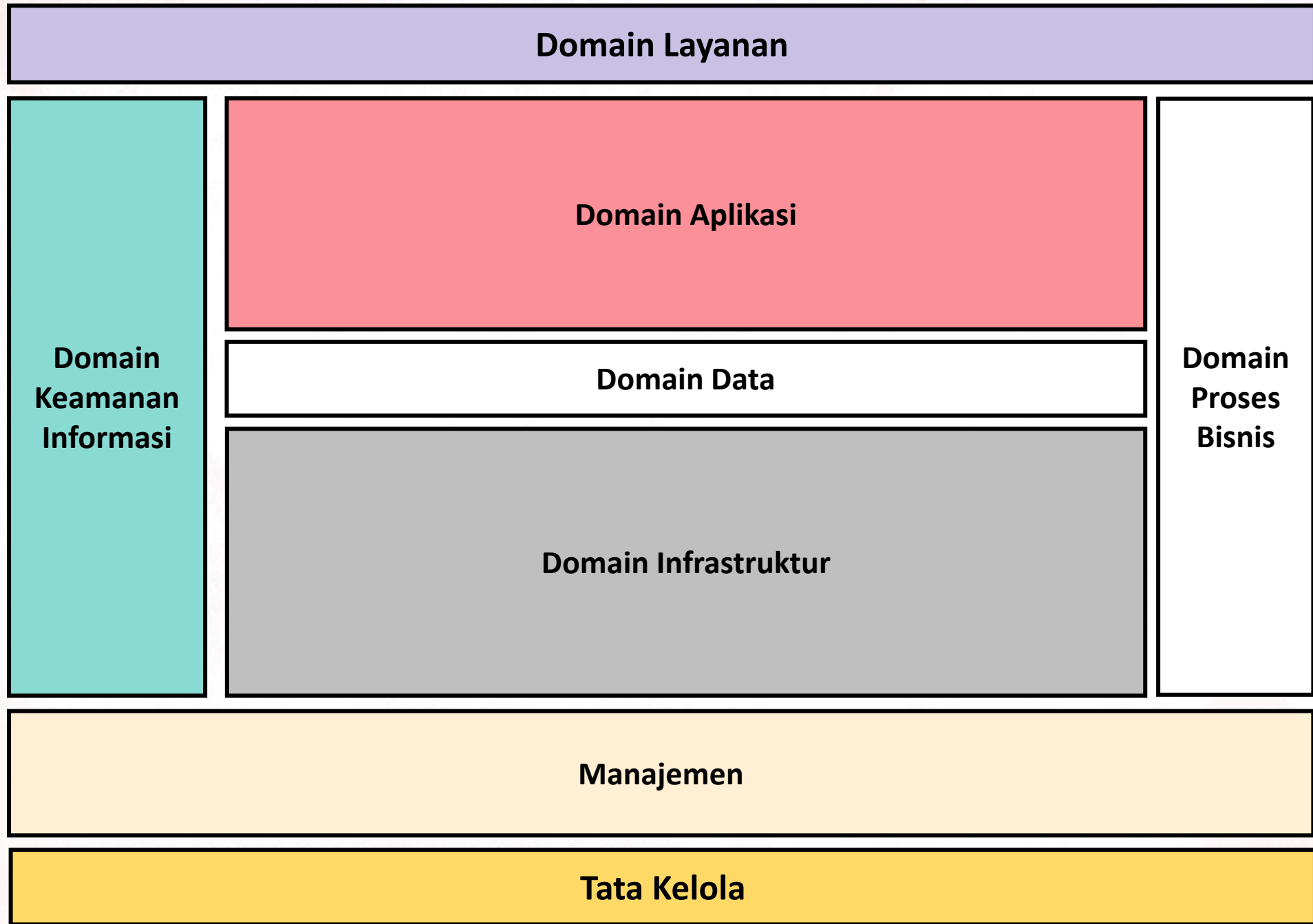
Layanan

- Data Terbuka
- Barang milik Negara
- Akuntabilitas Kinerja Organisasi

PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE



Arsitektur SPBE Nasional



Peta Rencana SPBE

Muatan Peta Rencana	Program Kegiatan
Tata Kelola	Penguatan kebijakan perizinan terintegrasi 1. Penetapan aplikasi umum perizinan terintegrasi 2. SOP aplikasi umum perizinan terintegrasi
Manajemen	Manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen layanan
Layanan	Layanan perizinan terintegrasi
Audit	Audit aplikasi, audit infrastruktur, audit keamanan
Infrastruktur	Pusat Data Nasional, Jaringan Intra-pemerintah, Sistem Penghubung Layanan
Aplikasi	SINSW, Sicantik <i>Cloud</i> , OSS, dll
Keamanan	CSIRT dll

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Presiden RI

Laporan minimal 2x ke Presiden

Dewan Pengarah

MenPAN RB

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 2x/tahun)

Mendagri

Menkeu

Menkominfo

Ka. Bappenas

Ka. BSSN

Ka. BPPT

Dewan Pengawas

Sekretariat Tim Koordinasi SPBE
Nasional (PMO)

Deputi Balaks

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 2x/tahun)

Pj.Es1 Kemendagri

Pj.Es1 Kemenkeu

Pj.Es1 Kemenkominfo

Pj.Es1. Bappenas

Pj.Es1. BSSN

Pj.Es1. BPPT

Tim Pelaksana

Koordinator

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE

Bid. Manajemen
Transformasi Proses Bisnis Digital, Risiko, dan
Penerapan SPBE
Maja (Ketua dari KemenpanRB)

Bid. Manajemen Perubahan
(Ketua dari KemenpanRB)

Bid. Manajemen
SDM SPBE
(Ketua dari KemenpanRB)

Bid. Manajemen Infrastruktur TIK
dan Aplikasi
(Ketua dari Kemenkominfo)

1. Bid. Manajemen Data
2. (Ketua dari Bappenas)

Bid. Manajemen
Keamanan Informasi
(Ketua dari BSSN)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Ketua dari BPPT)

Bid. Manajemen Anggaran SPBE
(Ketua dari Kemenkeu)

Bid. Perencanaan SPBE
(Ketua dari Bappenas)

Bid. Transformasi Proses Bisnis
Pemda
(Ketua dari Kemendagri)

Bid. Audit TIK
(Ketua dari Kemenkominfo)

TIM KOORDINASI SPBE Pemerintah Daerah

Dewan Pengawas

Ketua

Gubernur/Bupati/Walikota

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Nasional

Seluruh unit kerja Eselon 1 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tim Pelaksana

Koordinator

Sekretaris Daerah

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko
(Biro Ortala)

Bid. Manajemen Perubahan
(Biro Ortala)

Bid. Manajemen SDM
(Biro SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
(Diskominfo)

Bid. Manajemen Data
(Diskominfo)

Bid. Manajemen Keamanan Informasi
(Diskominfo)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Diskominfo)

Bid. Penganggaran SPBE
(Bappeda-Biro Keuangan)

Bid. Perencanaan SPBE
(Bappeda)

Bid. Audit TIK
(Inspektorat)

Tindak Lanjut Penerapan SPBE Di Daerah

Sinergi dan integrasi dalam Penerapan SPBE (kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE)

Harmonisasi program/kegiatan SPBE dengan renstra/RPJMD

Persiapan lebih dini terkait evaluasi SPBE tahun 2021

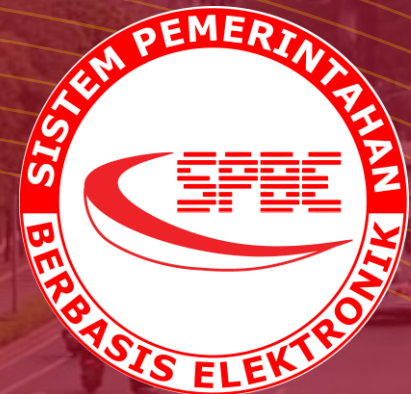
Koordinasi dengan Instansi Pengampu (Kominfo, BPPT, BSSN, KemenPANRB) terkait kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



THANK YOU
TERIMA KASIH
감사합니다



Jakarta, 23 Februari 2021